

## Mural Kritikan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Komunikasi Politik

Belarminus Lambertus Ajo Bupu <sup>1</sup>; Zainul Djumadin <sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; [zainulunas@yahoo.co.id](mailto:zainulunas@yahoo.co.id)

\*Correspondence : [zainulunas@yahoo.co.id](mailto:zainulunas@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini mendalami kritik sosial dalam bentuk mural sebagai wujud dari komunikasi politik yang berakar pada nilai-nilai demokrasi, dengan fokus pada kebebasan berpendapat. Mural merupakan salah satu ekspresi seni rupa yang biasanya memanfaatkan tembok atau dinding sebagai medianya. Seni mural yang dihasilkan oleh seniman memiliki beragam tujuan, mulai dari memenuhi hasrat estetis pribadi hingga menyampaikan pesan politik dan sosial budaya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami peran mural sebagai bentuk kritik sosial selama masa pandemi dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong timbulnya pesan kritik terhadap pemerintah terkait pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini melibatkan studi literatur yang memfokuskan pada seni mural, analisis dokumentasi melalui media cetak dan media online, serta wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mural kritik sosial sebagai bentuk komunikasi politik.

### ABSTRACT

This research delves into social criticism in the form of murals as an expression of political communication rooted in democratic values, with a focus on freedom of expression. Murals are one of the expressions of visual art that typically utilize walls or surfaces as their canvas. The murals created by artists serve various purposes, ranging from fulfilling personal aesthetic desires to conveying political and socio-cultural messages. The primary objective of this study is to understand the role of murals as a form of social critique during the pandemic and to identify the factors that contribute to the emergence of critical messages directed at the government regarding the COVID-19 pandemic. The research methodology employed is a qualitative descriptive approach. The steps taken in this research involve a literature review focusing on mural art, documentation analysis through print and online media, as well as interviews to gain a deeper understanding of social critique murals as a form of political communication.

### Kata kunci

*Mural, Kritikan Sosial, Komunikasi Politik, Demokrasi, Kebebasan Berpendapat*

### Keywords

*Mural, Social Criticism, Political Communication, Democracy, Freedom of Opinion*

## Pendahuluan

Komunikasi merupakan kegiatan alamiah dan melekat erat pada seorang manusia, sebab komunikasi merupakan kegiatan pengiriman informasi, gagasan, kebutuhan, dan kepentingan seseorang kepada orang lain, baik individu maupun banyak orang (Mali et al., 2022). Informasi, gagasan, kebutuhan dan kepentingan tersebut diubah menjadi pesan, baik dalam bentuk kata-kata, simbol bergambar maupun warna, serta bahasa tubuh. Sehingga orang yang menjadi penerima pesan tersebut memahami informasi yang diberikan, memenuhi kebutuhan dan kepentingan pengirim pesan, bahkan ingin mewujudkan gagasan pengirim pesan (Wiriamihardja, 2023). Proses ini dilakukan jauh sebelum manusia merumuskan jenis huruf hingga menjadi rangkaian kata-kata dan pada akhirnya menjadi bahasa yang dipakai. Hal ini dapat dilihat dari manusia pada masa lampau di zaman batu, menggambarkan pola kehidupan mereka pada dinding batu. Sementara manusia pada zaman logam dan seterusnya menuliskan kehidupannya pada tulisan prasasti, namun proses penggambaran tetap dilakukan melalui pahatan pada batu dan benda lain. Batu dan benda lain tersebut menjadi media penghantar pesan informasi, gagasan, kebutuhan dan keinginan manusia.

Kegiatan purba manusia ini telah bertransformasi dalam berbagai bentuk media, isi pesan, alat, serta cara menyampaikan pesan (Nuriqli et al., 2022). Namun siklus bentuk dan tujuannya tidak pernah berubah. Sehingga komunikasi dianggap oleh sebagian orang adalah kegiatan tertua manusia, sebelum manusia mulai mempelajari alam semesta dan kehidupan sosialnya. Namun sebagai sebuah ilmu, komunikasi dianggap lahir belakangan, bahkan perkembangan ilmu yang melahirkan berbagai 1 bentuk media dan teknis atau strategi komunikasi masih terus bermunculan dan berubah. Proses menyampaikan pesan tersebut terus berubah sesuai konteks yang melingkupinya, termasuk dalam kegiatan politik (Ifada & Azeharie, 2022). Komunikasi dalam kegiatan politik diawali dari kesadaran manusia bahwa kebutuhan hidup mereka mulai langka, manusia mulai berkomunikasi satu sama lain untuk hidup berkelompok dan saling memenuhi kebutuhan hidup secara bersama-sama. Selanjutnya mereka saling berkomunikasi untuk melahirkan aturan kehidupan bersama, menegakkan aturan, hingga menyepakati pemimpin yang menegakkan aturan tersebut. Selanjutnya sang pemimpin melakukan komunikasi untuk menjalankan wewenangnya, dan mengkomunikasikan kekuasaan yang dimilikinya. Sementara yang dipimpin mengkomunikasikan kebutuhan dan masalah bersama untuk diatasi bersama, maupun untuk diselesaikan oleh sang pemimpin. Sehingga kebebasan komunikasi dalam sistem politik dapat diidentifikasi dalam berbagai jenis bentuk praktek politik (Budiarsa & Pandiangan, 2022).

Komunikasi yang bebas dapat dilihat dalam semangat liberalisme, komunikasi yang bebas, bertanggungjawab ada dalam demokrasi, komunikasi yang dikekang, diatur, hingga dilarang ada dalam sistem yang otoriter dan totaliter (Wardianto et al., 2022). Sehingga bentuk dari pola komunikasi dapat diidentifikasi dalam berbagai

ideologi, sistem pemerintahan, maupun bentuk sistem politik itu sendiri secara holistik. Sehingga haruslah disadari bahwa komunikasi dalam sistem politik memainkan peran terpenting terhadap keberhasilan pencapaian tujuan sistem politik itu sendiri, baik itu komunikasi antar individu, komunikasi massa, dan komunikasi organisasi (Iftakhurizaq & Dharmawan, 2020). Pada semua jenis komunikasi itu pada hakikatnya yang dilakukan adalah masyarakat mengirimkan pesan kebutuhan, keinginan atau kepentingan, diproses dalam pemerintahan oleh eksekutif dan legislatif, serta dipengaruhi oleh partai politik, LSM, dan media massa yang ketiganya juga mempengaruhi karena adanya komunikasi dari masyarakat atau itu adalah kebutuhan dan kepentingan ke 3 lembaga itu sendiri, semua itu disebut input. Proses yang dimaksudkan dalam tubuh pemerintahan pun terjadi proses komunikasi antara legislatif dan eksekutif, yang mendiskusikan apa yang terbaik bagi masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, selanjutnya hasil dari proses tersebut adalah lahirnya kebijakan yang disebut sebagai output, lalu dikomunikasikan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan politik, dan diterapkan kepada masyarakat.

Masyarakat kemudian akan mengkomunikasikan lagi responnya terhadap output tersebut kepada pemerintah secara langsung atau melalui media massa, partai politik dan atau LSM, yang disebut sebagai input (Yohana, 2021). Sistem politik terjadi hampir pada setiap kegiatan politik dalam sistem politik, sehingga disebut sebagai komunikasi politik. Pengabaian terhadap komunikasi politik adalah sebuah kemustahilan. Tentu ini jika sebuah negara menerapkan sistem politik demokrasi atau menggunakan ideologi demokrasi. Berkenan dengan hal itu, Komunikasi Politik adalah fungsi penting dalam sistem politik. Pada setiap proses politik, komunikasi politik dinyatakan sebagai "urat nadi" proses politik. Bagaimana tidak, aneka struktur politik seperti Parlemen, Kepresidenan, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Kepentingan, dan Warga Negara biasa memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik ini.

Menurut Rusadi Kantaprawira, komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai penghubungan pikiran politik yang ada di dalam masyarakat, termasuk pikiran yang berkaitan dengan golongan, asosiasi, instansi, atau sektor kehidupan politik pemerintah. Pandangan Rusadi lebih menekankan pada aspek kegunaan dari komunikasi politik. Sementara itu, Astrid S. Soesanto, yang dikutip oleh Thomas Tokan Pureklolon dalam bukunya tentang "Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi, Politisi, dan Negarawan," menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dengan cara tertentu sehingga pada isu yang dibahas oleh komunikasi tersebut, semua anggota masyarakat terlibat melalui sanksi yang ditetapkan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Komunikasi politik dapat terjadi dalam tiga bentuk utama, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, dan komunikasi organisasi (Dwitama et al., 2022).

Media yang digunakan meliputi media cetak, media elektronik, dan media internet (Febri et al., 2022). Media-media ini dapat berfungsi sebagai perantara untuk mengirimkan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, dan video. Media-media ini dapat dikategorikan sebagai media konvensional yang dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah dan media non-konvensional yang tidak melalui proses penyaringan. Terakhir, terdapat bentuk komunikasi politik yang berupa mural, yang muncul dalam berbagai konteks sejarah Indonesia dan saat ini kembali relevan, terutama selama pandemi Covid-19.

Mural adalah bentuk komunikasi politik yang tidak dapat dengan mudah disaring atau difilter oleh siapa pun, dan mudah dilihat oleh masyarakat (Lestari et al., 2020). Selama pandemi Covid-19, mural telah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan terkait protokol kesehatan dan berbagai kritikan sosial terhadap kebijakan pemerintah dan dampak pandemi tersebut. Mural menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik sosial, terutama ketika sistem formal penyampaian aspirasi tidak berjalan dengan baik atau pemerintah tidak dapat memadai menanggapi aspirasi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitian adalah pada mural yang bersifat kritikan sosial selama pandemi Covid-19, yang menjadi bentuk komunikasi politik yang relevan dan penting untuk dipahami dan dianalisis. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Mural Kritikan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Komunikasi Politik."

Mural merupakan bagian dari konsep komunikasi politik masyarakat yang berbentuk aspirasi publik atau aspirasi politik yang disampaikan kepada Pemerintah baik eksekutif maupun legislative (Rahmansyah et al., 2020). Aspirasi publik itu ada dalam penyampaian kebutuhan, kepentingan, ataupun masalah serta ada dalam bentuk kritikan dan dukungan, dalam konteks penelitian ini mural yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah mural yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19 serta kebijakan penanggulangan Covid-19 itu sendiri. Oleh karena itu, teori yang dipakai adalah Teori Jarum Suntik, dimana teori ini menyatakan bahwa pesan yang disampaikan oleh media kepada publik itu bersifat satu arah dan kemudian mampu membentuk afektif, kognitif, dan behavioral publik yang menerima pesan tanpa adanya kemampuan publik untuk memberikan respon terhadap komunikator. Dalam Teori Jarum Suntik, unsur pembentuknya adalah komunikator, komunike, media, dan efek. Komunikator dalam konteks pembuatan mural ini adalah si pembuat mural itu sendiri yang tidak dapat diidentifikasi karena sifatnya tertutup, terselubung, dan tidak ingin diungkap karena komunike atau pesan politiknya itu berisi kritikan sosial terhadap kebijakan Pemerintah (Tindarana & Naryoso, 2022).

Dalam penelitian ini berfokus pada mural yang berisi pesan politik yang digambarkan pada dinding seperti tembok maupun fasilitas umum yang dapat dilihat oleh ruang publik. Sementara efek yang dimaksud adalah kritikan sosial itu berdampak pada terbentuknya afektif, kognitif, dan behavioral publik yang

membaca atau melihat mural yang berisi kritikan sosial tersebut (Sunaryanto et al., 2022). Afektif itu berkaitan dengan sikap atau emosi publik yang bisa saja berbentuk menjadi kesedihan, kemarahan ataupun terprovokasi, sedangkan kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan publik, dan behavioral itu adalah perilaku publik yang mendukung atau menolak Pemerintah sehingga kemudian keseluruhan indikator komunikator, komunika, media, dan efek adalah bagian dari komunikasi politik publik melalui mural sebagai komunikasi politik masyarakat. Mural tersebut muncul karena ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses media massa ataupun takut karena terjerat Undang- Undang ITE ketika menyampaikan kritikan yang bersifat menyerang Pemerintah.

## Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Secara harfiah, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau pembentukan cara lain yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif lebih berfokus pada aspek kualitas, nilai, atau makna yang terkandung dalam fakta-fakta. Kualitas, nilai, atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bukan berbentuk bilangan, angka, skor, nilai, peringkat, atau frekuensi yang biasanya dianalisis dengan perhitungan matematik atau statistik. Pendekatan penelitian kualitatif menjadi acuan dan paradigma bagi penulis untuk mendeskripsikan mural sebagai media kritikan sosial di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya untuk menemukan dan menginterpretasikan nilai, sikap, dan motivasi dari para pelaku mural serta pendapat publik, terutama para tokoh dan aktor politik, terkait mural kritikan sosial selama pandemi Covid-19.

Dari segi jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti suatu kelompok, objek, kondisi, dan sistem pemikiran dengan tujuan membuat deskripsi sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif dapat membandingkan fenomena tertentu, sehingga juga disebut sebagai studi komparatif. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan motivasi, nilai, pendapat, dan praktik mural sebagai bentuk media kritikan sosial terkait pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga akan mencermati pendapat dan penilaian para tokoh dan aktor politik terkait mural yang mengkritik pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi mengingat konteks yang unik dari pandemi Covid-19 sebagai fenomena baru yang pertama kali terjadi.

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa teknik, termasuk kajian kepustakaan untuk data sekunder, serta wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer. Data yang akan dikumpulkan mencakup teori-teori dan landasan yuridis yang berkaitan dengan demokrasi, komunikasi, komunikasi politik, dan mural, serta informasi dari sumber-sumber berupa buku, media massa, jurnal, notulensi, dan dokumen lainnya. Setelah pengumpulan data, analisis data dilakukan dengan cermat. Data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis dengan menggunakan teknik yang bermacam-macam. Analisis data ini dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh data yang cukup. Analisis data memerlukan ketajaman pemikiran dan memungkinkan penarikan kesimpulan setelah memberikan pemaparan dari berbagai data yang diperoleh di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

### **Mural Kritikan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Komunikasi Politik**

Mural bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Mural telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan pada zaman purba ditemukan beberapa mural di tembok-tembok gua, membuktikan bahwa seni mural telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu (Pambudi et al., 2021). Seni mural dianggap sebagai media yang mampu menginterpretasikan problem-problem sosial di masyarakat, dan ini telah menjadi salah satu bentuk komunikasi politik yang penting. Pada masa kemerdekaan, para pemuda Indonesia menggunakan mural untuk memberikan semangat kepada para pejuang dan sebagai alat perlawanan terhadap penjajah. Mural juga digunakan untuk menginterpretasikan realitas sosial pada masa sekarang. Kemunculan mural di Indonesia dapat ditelusuri setidaknya sejak periode revolusi, di mana dinding-dinding kota wilayah Republik Indonesia yang bergejolak digunakan untuk menuliskan seruan propaganda yang mendukung kemerdekaan. Ini mencerminkan bagaimana mural dapat digunakan sebagai alat komunikasi politik untuk menyuarakan aspirasi dan pesan kepada masyarakat.

Mural merupakan salah satu bentuk seni yang diciptakan di ruang publik, khususnya dinding atau tembok, dan seringkali memuat gambar-gambar yang mengandung pesan tertentu (Kurniawan & Sutan, 2021). Selain sebagai bentuk seni, mural juga digunakan oleh para pencinta seni untuk mengkritik sosial dan menyampaikan aspirasi tertentu, terutama dalam hal isu-isu permasalahan sosial atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks pandemi Covid-19, para seniman mural membuat karya yang memiliki pesan dan makna, yang ditujukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Mural menjadi media yang tidak hanya dinikmati secara visual tetapi juga mengandung pesan yang mendalam. Mural juga merupakan bentuk komunikasi politik yang melibatkan berbagai aktor, seperti seniman, pemuda, masyarakat, dan bahkan pemerintah (Noorikhsan et al., 2023). Mural sering

digunakan untuk menyampaikan pesan politik, mengkritik kebijakan pemerintah, atau memberikan dukungan terhadap gerakan sosial.

Dalam konteks komunikasi politik, mural merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengalirkan informasi melalui masyarakat dan berbagai struktur dalam sistem politik (Maknuni, 2021). Komunikasi politik melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat. Mural juga memiliki fungsi dalam proses komunikasi politik, seperti mengenalkan masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah, menguatkan rasa persatuan nasional, meningkatkan aktivitas politik masyarakat, dan menjadi pengawas terhadap pemerintahan yang baik dan jujur. Dalam komunikasi politik, mural dapat dianggap sebagai saluran yang memungkinkan para komunikator untuk menyampaikan berita dengan cara menggambar dan menulis di dinding dalam kemasan yang spektakuler dan dramatis, sehingga dapat menarik perhatian banyak peminat dan memengaruhi opini publik. Dengan demikian, mural merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang kuat dan efektif dalam menyuarakan aspirasi, mengkritik, dan menyampaikan pesan politik kepada masyarakat, pemerintah, dan aktor politik lainnya. Mural menjadi medium yang kuat untuk menginspirasi perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Komunikasi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam membangun dan memelihara prinsip-prinsip demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki tiga unsur utama yang mendukung tegaknya demokrasi, yaitu negara hukum, masyarakat madani (civil society), dan infrastruktur politik (Tindarana & Naryoso, 2022). Masyarakat madani adalah ciri penting dari sistem demokrasi di Indonesia. Ini mencerminkan masyarakat yang terbuka dan bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Konsep ini memainkan peran penting dalam membangun demokrasi yang kuat. Untuk meyakinkan masyarakat akan kebaikan sistem demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang diyakini oleh masyarakat harus ditanamkan, termasuk kesadaran akan pluralisme. Demokrasi dan komunikasi politik adalah dua hal yang saling berhubungan. Tidak ada demokrasi yang kuat tanpa kebebasan komunikasi politik. Di Indonesia, kebebasan komunikasi politik dan demokrasi telah tumbuh sejak Reformasi Politik 1998. Komunikasi politik dalam sistem politik memiliki peran penting dalam mengolah keputusan politik dari berbagai aspirasi dan kepentingan menjadi kebijakan publik yang konkrit. Media massa yang bebas dan dilindungi oleh hukum juga menjadi alat penting dalam komunikasi politik karena menciptakan wilayah untuk masyarakat umum.

Demokrasi yang dianut Indonesia masih berkembang, dan masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip demokrasi seperti kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, kebebasan memilih dan dipilih, serta akses informasi yang akurat. Komunikasi politik memainkan peran penting dalam demokratisasi. Dalam sistem politik yang terbuka, siapa pun dapat menjadi aktor politik yang

berkompetisi untuk mempengaruhi kebijakan publik. Komunikasi politik membantu mengimbangi dan mengontrol kekuasaan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Media massa juga memainkan peran penting dalam membuka isu-isu politik kepada masyarakat, sehingga publik dapat terlibat dalam pembuatan keputusan politik. Melalui mural, masyarakat dapat mengekspresikan kritik sosial terhadap berbagai isu, termasuk penanganan pandemi COVID-19. Mural ini memungkinkan pesan politik dan kritik sosial disampaikan secara visual kepada masyarakat. Dalam konteks pandemi, mural ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dampak pandemi. Namun, penggunaan mural untuk menyampaikan pesan politik juga memiliki tantangan. Beberapa mural dapat dianggap merusak fasilitas atau mengganggu estetika, dan dalam beberapa kasus, pelakunya dapat menghadapi tindakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab dalam menggunakan media visual seperti mural. Dalam kesimpulan, komunikasi politik memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan memelihara demokrasi di Indonesia. Masyarakat madani, kebebasan komunikasi politik, dan media massa yang bebas adalah elemen penting dalam sistem demokrasi. Melalui mural, masyarakat dapat mengungkapkan kritik sosial dan aspirasi politik mereka, meskipun penggunaannya juga dapat menimbulkan kontroversi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi, sebagai suatu sistem, memiliki unsur-unsur yang membuatnya eksis dan tegak dalam sebuah negara. Unsur-unsur tersebut termasuk negara hukum, masyarakat madani (*civil society*), dan infrastruktur politik. Masyarakat madani adalah masyarakat terbuka yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, yang merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi. Untuk meyakinkan akan baiknya sistem demokrasi, diperlukan pola perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang diyakini oleh masyarakat, termasuk kesadaran akan pluralisme.

Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi jika memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti adanya kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, serta kebebasan untuk mengakses informasi yang akurat dan kebebasan berserikat yang terbuka. Demokrasi memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara karena memberikan arti penting yang menciptakan keadilan dan kenyamanan. Kemerdekaan berpendapat dan berekspresi termasuk hak mendasar dalam kehidupan bernegara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) dan Undang-Undang No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Mural, selain menjadi bentuk seni, juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kritik sosial dan aspirasi tertentu. Para seniman seringkali mengangkat isu-isu sosial dan mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah melalui karya seni ini. Khususnya dalam konteks pandemi COVID-19, seniman menciptakan karya yang tidak hanya visual tetapi juga penuh pesan dan makna, yang membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial di sekitarnya. Kritik sosial melalui mural adalah bentuk aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan menganalisis keadaan sosial pada suatu konteks tertentu, menunjukkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Kritik sosial berperan sebagai alat kontrol sosial terhadap sistem dan proses hubungan bermasyarakat, yang memastikan bahwa anggota masyarakat menjalankan proses sosial sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Dalam konteks komunikasi politik, mural menjadi alat untuk menyampaikan informasi tentang politik kepada masyarakat luas.

Mural berperan sebagai wadah untuk membicarakan dan mendiskusikan masalah politik, mempublikasikan informasi politik kepada masyarakat dan pemerintah, serta menjadi media perantara dalam mengaplikasikan aturan tertentu. Melalui mural, masyarakat dapat memahami berita politik dengan cara yang kreatif, meningkatkan partisipasi politik, dan mendorong keadilan serta kebenaran dalam proses politik. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, penting untuk mendukung dan menghargai mural yang mengkritik pemerintah sebagai bentuk aspirasi rakyat. Selain itu, komunikasi politik harus terus ditingkatkan dengan cara yang baik dan santun untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks ini, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap peran mural dalam mendorong kritik sosial dan partisipasi politik. Upaya untuk memahami dan menghargai karya seni ini sebagai cerminan aspirasi dan keinginan masyarakat akan menjadi langkah positif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

## Referensi

- Budiarsa, Y. T., & Pandiangan, A. (2022). Komunikasi Politik di Masa Pandemi: Analisis Isi Unggahan Instagram mengenai Program Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 26(2), 123–138.
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53–66.
- Febri, R., Suryanef, S., Hasrul, H., & Irwan, I. (2022). Kampanye politik melalui media sosial oleh kandidat calon kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada pilkada tahun 2020. *Journal of Civic Education*, 5(2), 269–277.
- Ifada, B. I., & Azeharie, S. S. (2022). Studi Semiotika pada Mural di Jalan (Analisis Roland Barthes Pada Mural Yang Dihapus Setelah Viral). *Kiwari*, 1(1), 69–77.

- Iftakhurizaq, A. B., & Dharmawan, A. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Maraknya Mural Kritikan Terhadap Pemerintah Pada Masa Pandemi Di Media Tempo. Co Dan Media Indonesia (Periode 12 Agustus-01 September 2021)*.
- Kurniawan, D., & Sutan, A. J. (2021). Penggunaan Sosial Media Dalam Menyebarkan Program Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 27–34.
- Lestari, N. P. K. D., Erviantono, T., & Puspitasari, N. W. R. N. (n.d.). *Analisis Strategi Komunikasi Politik Jaya Negara dalam Membentuk Political Branding Melalui Media Sosial Instagram*.
- Maknuni, J. (2021). Seni Mural Media Komunikasi Politik Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 90–100.
- Mali, F. X. G. T., Bupu, B. L. A., & Mite, M. Y. (2022). Dilema Input Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Krisis (Studi Fenomena Mural Pada Masa Pandemi Covid 19). *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 159–174.
- Noorikhsan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1), 95–109.
- Nuriqli, A., Qomaluddin, P., & Hayat, M. A. (2022). Komunikasi Politik Polri Dalam Menghadapi Kritik Melalui Bhayangkara Mural Festival 2021. *Journal of Syntax Literate*, 7(1).
- Pambudi, H. J., Nugroho, A. L. A., Handoko, L., & Dianastiti, F. E. (2021). Buzzer Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Analisis Wacana Kritis Kicauan Buzzer Di Twitter: Study Of Critical Discourse Analysysis Of Buzzer’S Tweet In Twitter. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(1).
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102.
- Sunaryanto, S., Bakti, A. F., & Soleha, Y. (2022). Meme Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Juliari Batubara di Media Siber: Perspektif Meaning and Media. *Jurnal Desain*, 9(3), 339–354.
- Tindarana, E. D., & Naryoso, A. (2022). Analisis Percakapan Netizen Tentang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Di Akun Sosial Media Instagram@ Kominfo. Jateng. *Interaksi Online*, 10(3), 699–710.
- Wardianto, B. S., Supriyono, S., & Kurniawan, H. (2022). Fungsi Komunikatif Wacana Mural Bertema Penanganan Pandemi Covid-19 di Media Daring dalam Pendekatan Pragmatik (Communicative Function of Mural Discourse Themed on Handling the Covid-19 Pandemic in Online Media in a Pragmatic Approach). *Jalabahasa*, 18(1), 27–35.
- Wiriamihardja, A. E. (2023). Penggunaan Mural dalam Ruang Publik Batucapeper Sebagai Bentuk Kritik Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*, 12, 551–563.

Yohana, F. M. (2021). Mural sebagai Media Penyampai Pesan Sosial Bagi Masyarakat dalam Perspektif Semiotika Charles Sanders Peirce. *Gandiwa Jurnal Komunikasi*, 1(2), 60–74.